



Jatah Dana Beasiswa Berkurang

DENPASAR, TRIBUN BALI

Pada tahun 2018 ini, jumlah beasiswa yang diberikan kepada siswa di Bali mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya untuk jenjang SMA dapat Rp 2 juta, maka tahun ini hanya Rp 700 ribu.

Pengurangan jumlah beasiswa terjadi karena perubahan pendanaan yang dulunya dari program beasiswa Bali Mandara, kemudian pada 2018 ini diubah menjadi beasiswa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Kabid Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Bali, Komang Merta Dana mengatakan dalam program Bali Mandara bagi para siswa SD diberikan beasiswa Rp 625 ribu per siswa per tahun, siswa SMP Rp 890 ribu per siswa per tahun, SMA Rp 2 juta per siswa per tahun, dan siswa SMK diberikan beasiswa Rp 3,2 juta.

"Beasiswa ini digelontorkan dalam program Bali Mandara jilid pertama sampai jilid kedua," kata Merta Dana dalam Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), di Lapangan Renon, Denpasar pada Minggu (26/8).

Setelah pembagian tugas dimana provinsi hanya fokus di jenjang SMA dan SMK, sedangkan Kabupaten/Kota membina SD dan SMP, maka tahun 2018 ini beasiswa yang diberikan diubah menjadi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Dalam BOP, setiap siswa SMA negeri mendapat bantuan Rp 700 ribu per tahun, dan untuk siswa SMK negeri mendapat bantuan Rp 900 ribu per tahun. Adapun jumlah siswa baru yang dipastikan menerima BOP tahun 2018 pada jenjang SMA/SMK negeri yaitu 42.701 orang. "BOP dikhususkan bagi siswa-siswi SMA dan SMK negeri, sedangkan khusus untuk para siswa yang tidak mampu dari sekolah

swasta juga diberikan bantuan sejumlah Rp 1 juta per siswa per tahun," sebutnya.

Dalam program Bali Mandara sebelumnya, juga ada program bidikmisi yang ditujukan kepada SMP yang kurang mampu, namun beasiswa tersebut terakhir diberikan pada tahun 2017. "Jadi anak-anak SMP yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena faktor finansial kita bantu. Kita sekolahkan ke SMK negeri di Denpasar dan diberikan beasiswa Rp 22 juta per siswa per tahun," terangya.

Menurutnya, dana tersebut bisa digunakan untuk membayar SPP, membayar kos, dipergunakan untuk biaya hidup dan membeli keperluan sekolah, hingga mereka tamat SMK. Sambungnya, Beasiswa Bidikmisi tersebut disediakan untuk 50 orang siswa per tahunnya, dan mereka akan disekolahkan di SMKN 1 Denpasar.

Kemudian, di setiap Kabupaten/Kota juga diberikan kuota beasiswa bidikmisi, masing-masing 10 orang per Kabupaten/Kota. "Begitu juga di Kabupaten/Kota, dijatah 10 anak SMP untuk melanjutkan ke SMK negeri. Kita ingin agar anak-anak Bali, yang karena faktor finansial tidak bisa sekolah, kita bantu agar mereka bisa menikmati layanan pendidikan," ujarnya.

Merta Dana menuturkan sejak awal program Bali Mandara, khususnya dalam bidang pendidikan diluncurkan angka putus siswa di Bali mengalami penurunan. Pada awal pemerintahan, angka putus sekolah tingkat SD adalah 414 orang atau 0,1 persen, kemudian pada akhir 2017 menjadi 75 orang. Untuk jenjang SMP, angka putus sekolah dari 318 orang, terakhir menjadi 74 orang, dan untuk tingkat SMA dari 739 orang, terakhir

menjadi 38 orang.

"Ini membuktikan program beasiswa sangat membantu bagi masyarakat kurang mampu," tegasnya.

Selain itu juga telah dibangun sekolah Bali Mandara, yang mana sekolah tersebut mencari anak-anak yang sangat miskin dari seluruh pelosok desa di Bali. "Kita bantu anak-anak ini dan kita sekolahkan. Mereka ditempatkan dalam asrama dan gratis. Dari asrama, SPP, pakaian, semua ditanggung oleh Pemprov Bali," ucapnya. (wem)



Saya juga Ditipu Orang Jakarta

● Setelah Korupsi, Kicen Tersangkut Kasus Penipuan



TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA

**I WAYAN KICEN
ADNYANA**

SEMARAPURA, TRIBUN BALI- I Wayan Kicen Adnyana tampak tenang ketika berada di Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, Selasa (21/8). Tidak sepele kata pun diucapkan mantan anggota DPRD Klungkung yang juga bertatus narapidana kasus korupsi tersebut.

Hari itu ia kembali harus

berurusan dengan hukum, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan penerimaan CPNS Provinsi Bali tahun 2015

"Saya juga ditipu oleh orang di Jakarta," ujar Kicen singkat saat ditanya wartawan.

Selasa (21/8), penyidik

BERSAMBUNG ● HAL 7

Saya juga Ditipu...

Sambungan Hal.1

Polres Klungkung melaksanakan pelimpahan tahap II terhadap barang bukti kasus dugaan penipuan penerimaan CPNS Provinsi Bali tahun 2015 dan tersangkanya, yakni I Wayan Kicen Adnyana.

Politisi asal Dusun Anjingan, Desa Getakan itu pun kembali akan disidang, kali ini untuk kasus penipuan dan penggelapan yang disangkakan padanya

Kicen tiba di Kejari Klungkung sekitar pukul 09.16 Wita. Politisi asal Dusun Anjingan, Desa Getakan itu tiba dengan mengenakan kemeja berwarna hitam dan celana panjang berwarna gelap.

Ia didampingi kuasa hukumnya AA Parwata dan anaknya Krisna Adiputra, yang juga terpidana kasus korupsi bantuan dana hibah pembangunan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan.

Saat tiba di Kejari Klungkung, Kicen dikawal dua orang petugas bersenjata lengkap. Lalu, mantan politisi Partai Gerindra ini melangkah pelan menuju ruang pidana umum. Di dalam

ruangan, salah seorang jaksa penuntut umum Cokorda Indra Sunu sudah menunggu kehadiran Kicen.

Hampir sejam, Kicen Adnyana diperiksa Cokorda Indra Sunu. Setelah menyelesaikan administrasi, Kicen Adnyana kembali dikeler ke dalam mobil polisi untuk selanjutnya dibawa ke Rutan Klungkung.

Menurut seorang penasihatnya, Anak Agung Gede Parwata, kliennya masih menjalani hukuman atas kasus korupsi. "Untuk (masa tahanan) kasus korupsinya, Desember tahun ini (2018) kayanya *clear* (bebas). Makanya untuk kasus penipuan belum ditahan, mungkin setelah itu," ujar Anak Agung Parwata.

Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Made Agus Dwi Wirawan menyatakan, penanganan dugaan kasus penipuan yang melibatkan mantan anggota DPRD Klungkung ini memang membutuhkan waktu cukup lama. Terlebih ada hal-hal yang harus dilengkapi, termasuk menyamakan persepsi dengan pihak Kejaksaan.

"Ini bagian dari penyidik untuk serahkan tersangka dan barang buktinya. Sebenarnya tidak ada kendala dalam proses penyidikan, namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita tambahkan. Karena kita harus samakan persepsi dengan kejaksaan baik bukti materiil maupun formilnya," jelas Made Agus Dwi Wirawan.

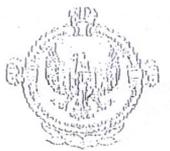
Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus penipuan yang menyeret nama Wayan Kicen Adnyana tersebut dilaporkan oleh I Wayan Suda, Warga Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Bangli, pada 17 Juni 2018.

Suda datang ke rumah Kicen untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 175 juta. Kicen saat itu mengaku mempunyai *link* di Jakarta, yang mampu meloloskan seseorang menjadi PNS.

Namun hingga tahun 2017, apa yang dijanjikan Kicen kepada Wayan Suda ternyata tidak kunjung dipenuhi. Anak dari Suda hingga saat ini tidak diterima sebagai PNS di Pemprov Bali. (mit)

Edisi : Rabu, 22 Agustus 2018

Hal : 1 dan 7



Badung Bakal Bangun Underpass Lagi

■ Lokasinya di Jalan Simpang Patung Kuda Tuban

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Satu lagi proyek underpass yang akan dibangun di wilayah Simpang Patung Kuda, Tuban, Kuta, Badung. Jika proyek ini lancar, maka Badung sudah membangun tiga underpass di wilayah Badung utara yang dianggap sebagai kantong kemacetan utama.

Informasi yang dihimpun di Pemkab Badung, rencana penambahan underpass tersebut masih menunggu hasil *feasibility study* (FS) atau studi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung.

Belum lama ini, Sekda Badung Wayan Adi Arnawam menjelaskan, bahwa pada APBD Perubahan tahun 2018 Pemkab Badung juga sudah membuat studi kelayakan untuk pembangunan underpass lagi, rencananya

mengambil lokasi di Jalan Simpang Patung Kuda depan Bandara Internasional Ngurah Rai, Badung.

Dirinya berharap ketika keluar dari bandara Internasional Ngurah Rai tidak ada lagi *traffic light*, sehingga tidak ada kendaraan berhenti. Akan tetapi kendaraan yang keluar dari bandara langsung lewat dan tidak ada kemacetan. "Kami sudah membuat FS (studi kelayakan) untuk pembangunan underpass untuk menghilangkan kesan kemacetan di Bali," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong Angkasa Pura I untuk melakukan penataan lalu lintas, termasuk parkir. Sehingga orang datang ke Bali, keluar dari Bandara Ngurah Rai benar-benar kesan macet bisa dihilangkan.

"Ini langkah pemerintah daerah mendukung

program pemerintah pusat. Sehingga nanti benar-benar kesan macet bisa kita minimalisir," tuturnya.

Untuk lelang Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Konsultansi Perencanaan, Penyusunan FS Underpass Simpang Patung Kuda Tuban telah dilakukan. Anggarannya bersumber dari APBD 2018. Nilai Pagu Paket Rp 515.000.000, dan Nilai HPS Rp 513.525.540. Untuk berapa nilai proyek belum disebutkan anggarannya.

Sebelumnya sudah dibangun underpass di Simpang Tugu Ngurah Rai, Tuban, Kuta. Proyek itu kini hampir rampung. Proyek yang sama juga sudah digunakan yakni underpass Dewa Ruci, Kuta. Dua proyek tersebut untuk mengurai kemacetan menuju bandara dan Kuta. (gus)

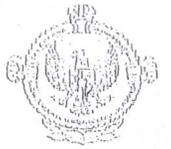


Kami sudah membuat FS (Studi Kelayakan) untuk pembangunan underpass untuk menghilangkan kesan kemacetan di Bali

Wayan Adi Arnawam
Sekda Badung

Edisi : Selasa, 21 Agustus 2018

Hal : 8.



■ Penggunaan Dana Gerbangsadu Rp 1 M Wajib Dipajang di Baliho

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Penggunaan dana Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Rp 1 miliar untuk desa wajib dipaparkan dan dipajang di baliho. Anggaran yang dikucurkan Pemprov Bali ini desa hanya dijatah Rp 20 juta untuk biaya operasional, sisanya untuk pengentasan kemiskinan.

Kabid Pembangunan Kawasan Pedesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Bali, Made Wiryata mengatakan, bantuan dana kepada desa

untuk pengembangan ekonomi dan infrastruktur dalam rangka pemberdayaan ekonomi di pedesaan.

"Jadi bantuannya sebesar satu miliar dua puluh juta rupiah tiap desa, yang mana dua puluh juta untuk biaya operasional, dan 80 persen dari satu miliar untuk pengembangan ekonomi yang dikelola masyarakat miskin dan juga dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," kata Wiryata dalam Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), di Lapangan Renon Denpasar,

pada Minggu (19/8).

Dana yang dikelola oleh BUMDes diprioritaskan untuk masyarakat miskin, dan bunganya maksimal 1 persen. "Karena kita ketahui masyarakat miskin yang memiliki usaha tentunya untuk mengakses modal ke bank tidak memungkinkan, ini karena tidak memiliki jaminan atau agunan," ujarnya.

Selanjutnya, sisa dana sebesar 20 persen digunakan untuk pengembangan infrastruktur sosial dasar masyarakat untuk me-

nunjang perekonomian. Ia mengungkapkan sampai dengan tahun 2017, jumlah desa yang telah mendapatkan Gerbangsadu di Bali sebanyak 217 dari 636 desa. Sambungnya, dari 636 desa di Bali tersebut, telah terbentuk 468 BUMDes.

"Desa-desa di Bali diharapkan semakin mandiri sehingga tidak ada lagi desa tertinggal. Saat ini sudah ada 43 desa yang tergolong mandiri, 280 lebih desa maju, dan 300 lebih desa berkembang. Berdasarkan

update data tahun 2018 yang sudah dipublikasi oleh Kementerian Desa, di Bali tidak ada lagi desa tertinggal," ungkapnya.

Dalam rangka transparansi pengelolaan anggaran dana desa, desa-desa di Bali wajib menginformasikan APBDes yang dikelola kepada masyarakat dalam bentuk pemasangan baliho.

"Wajib dipajang di tempat-tempat umum dan strategis, sehingga masya-

rakat dapat melihat dan ikut membantu memberikan pengawasan terhadap penggunaannya," imbuhnya. Dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dana Gerbangsadu ini berasal dari APBD yang bereda dengan dana desa yang diambilkan dari APBN. (wem)



TRIBUN BALI/WEMA SATYADINATA

MADE WIRYATA

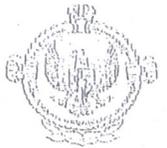
Setiap Tahun Dana Desa Bertambah

PADA tahun 2018 ini dana desa dialokasikan Rp 530 miliar, untuk dibagikan kepada 636 desa. "Tahun 2018 ini ada sedikit perubahan pengalokasian. Ada tambahan kriteria melalui dana afirmasi," kata Kabid Pembangunan Kawasan Pedesaan, Di-

nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemprov Bali, Made Wiryata.

Kucuran dana desa antara desa satu dengan desa lainnya belum tentu sama, tergantung pada luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan. Pada ta-

hun 2017, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana sejumlah Rp 537 miliar bagi 636 desa di Bali. Selanjutnya, Dana Desa Tahun 2015 jumlahnya Rp 185 miliar dan pada tahun 2016 meningkat tajam menjadi Rp 460 miliar. (wem)



BPKP Audit Investigasi Kasus Pungutan Retribusi

AMLAPURA, TRIBUN BALI - Petugas Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan (BPKP) turun ke Karangasem. Mereka melakukan audit investigasi kerugian negara dugaan kasus pungutan retribusi 10 objek wisata di Karangasem.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem, I Nyoman Sucitrawan menjelaskan, tim audit investigasi sebanyak lima orang. Sedangkan yang turun hanya tiga orang sejak tiga hari lalu dan telah kembali Kamis (16/8) kemarin.

Audit investigasi dilakukan menghitung kerugian negara pada dugaan kasus pungutan retribusi di sepuluh objek wisata. Tim telah menyisir beberapa objek. Dalam waktu dekat ini, BPKP mengumumkan berapa ke-

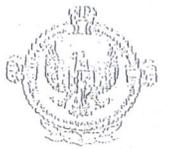
rugian negara.

Kasus ini mulai dialami sejak 2017 lalu. Bermula dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) tim Saber Pungli oleh petugas pungut uang retribusi di Objek Wisata Tulamben. Dalam sidang di Tipikor, petugas pungut mengatakan hampir semua menerapkan cara sama.

Setelah diselidiki benar. Tiket yang dibuat dan dikeluarkan Dinas Pariwisata tidak sesuai dengan pemasukan di Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem. Jumlah tiket yang terjual dengan pemasukannya tidak seimbang. Kejari juga telah memeriksa sekitar 15 saksi terkait kasus ini. Mulai dari petugas pungut hingga pejabat Dinas Pariwisata Karangasem. **(ful)**

Edisi : Sabtu, 18 Agustus 2018

Hal : _____



Bupati Eka Tak Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA, TRIBUN BALI - Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/8). Keduanya seharusnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo (YP) terkait kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2018.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YP (Yaya Purnomo), namun keduanya tak hadir. Untuk Ibu Ni Putu Eka belum diperoleh informasi terkait ketidakhadiran saksi. Sedangkan,

BERSAMBUNG ➔ HAL 7

Bisa Benar Bisa Tidak

BUPATI Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, menanggapi santai pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2018.

"Aaaah... Biasalah lah itu, yang namanya berita, *biarin aja berita*," kata Eka Wiryastuti

BERSAMBUNG ➔ HAL 7



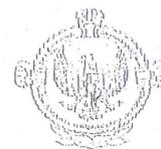
SAKSI - Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, beri keterangan kepada awak media di Tanah Lot, Tabanan, Rabu (15/8), terkait pemanggilannya oleh KPK sebagai saksi kasus suap RAPBN-Perubahan 2018. **Inzet:** Daftar jadwal pemeriksaan KPK pada Rabu (15/8).

NO	NAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN	PERKARA	UNTUK TERSANGKA
1	NI PUTU EKA WIRYASTUTI	Bupati Tabanan	Saksi	TPK suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018	YP
2	AGUSMAN SINAGA	Kepada Dispenda Labura	Saksi	TPK susup terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018	YP
3	H. HABIBUDDIN SIREGAR	Sekretaris Daerah Kab. Labuhan Batu Utara	Saksi	TPK susup terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018	YP
4	PROF. DR. BAHRULLAH AKBAR, M.S.A.	Wakil Ketua BPK RI	Saksi	TPK susup terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018	YP
			Saksi	TPK susup terkait kemungkinan kontrak kerja sama	ES

TRIBUN BALI/ MADE PRASETYA ARYAWAN/ILHAM RIAN PRATAMA

Edisi : **KOMIS**, 16 Agustus 2018

Hal : 1 & 7



Bupati Eka Tak...

Sambungan Hal.1

saudara Bahrullah tidak hadir karena sedang menunaikan ibadah haji," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu kemarin.

Febri pun menyatakan akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Eka Wiryastuti. Namun belum disebutkan kapan akan dipanggil ulang.

"Karena tidak datang hari ini (kemarin, red), nanti akan kami panggil kembali. Kami harap di pemanggilan berikutnya bisa hadir," kata Febri kepada *Tribunnews.com*.

KPK juga Manusia

Saat dikonfirmasi soal pemanggilan sebagai saksi ini, Eka Wiryastuti mengaku belum menerima surat pemanggilan dari KPK.

Ditemui di Tanah Lot, Tabanan, dalam acara geladi Tari Rejang Sandat Ratu Segara, Rabu sore, ia juga mengaku tak tahu terkait pemanggilan dari komisi antirasuah tersebut.

"Belum *sih*...belum ada saya dipanggil 15 Agustus dipanggil KPK. Buktinya hari ini (kemarin, red) saya masih di Tanah Lot menghadiri geladi bersih Tarian Rejang Sandat Ratu Segara," ujarnya kepada awak media.

Ditambahkan, jika memang dipanggil KPK untuk menjadi saksi terkait kasus tersebut, Eka Wiryastuti pun mengaku siap untuk datang ke Gedung Merah Putih KPK.

"Ya siap lah, ngapain *sih* dita-

kutin, KPK kan juga manusia," kata bupati asal Desa Angseri, Baturiti, Tabanan, ini.

Ketika pernyataan Eka Wiryastuti ini kembali dikonfirmasi kepada juru bicara KPK, ditegaskan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan.

"Ya tentu sudah dipanggil melalui surat panggilan. Kita sudah kirimkan surat pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi hari ini (kemarin, red)," kata Febri, tadi malam.

Panggil Saksi Lain

Selain Eka Wiryastuti dan Bahrullah Akbar, KPK juga memanggil saksi lainnya, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Habibuddin Siregar, Kepala Dispenda Labuhanbatu Utara Agusman Sinaga, dan Wakil Bendahara DPP PKB Rasta Wiguna. Adapula seorang PNS bernama Idawati dan pihak swasta bernama Iwan Sonjaya.

Untuk Wakil Bendahara DPP PKB, Rasta Wiguna, dalam pemanggilan kemarin juga tidak hadir. KPK akan melakukan pemanggilan ulang pada Kamis (16/8) hari ini.

Rasta dipanggil sebagai saksi untuk anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. "Dipanggil ulang besok (hari ini, red)," kata Febri.

Febri sebelumnya menje-

laskan, KPK terus menggali lebih jauh hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemeriksaan para saksi. Ia menjelaskan, pembahasan usulan dana perimbangan pada dasarnya melibatkan proses interaksi antara instansi terkait di pemerintah pusat dan daerah. Hal itulah yang terus didalami oleh KPK.

"(Terkait) proses penganggaran di DPR dan bagaimana hubungan kepentingan-kepentingan pihak instansi pusat di daerah juga penting bagi KPK," kata Febri.

"Kedua, sejauh mana pengetahuan mereka apakah ada aliran dana terkait proses penganggaran itu," sambungnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan anggota DPR Komisi XI Amin Santono dan pejabat nonaktif Kementerian Keuangan Yaya Purnomo sebagai tersangka terkait dengan penerimaan hadiah atau janji terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Selain Amin dan Yaya, KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast. Eka Kamaludin diketahui merupakan pihak swasta yang berperan sebagai perantara. Adapun, Ahmad Ghiast berstatus sebagai swasta atau kontraktor. Ahmad diduga sebagai pemberi uang.

(tribun Network/ham/mpa)



Anggaran Pembebasan Lahan Shortcut Ditambah Rp 7 M

SINGARAJA, TRIBUN BALI - Rencana pembangunan shortcut 5-6 di ruas jalan Singaraja-Mengwitani atau yang kini disebut dengan jalan baru batas kota Singaraja-Mengwitani kian mantap untuk dilaksanakan. Pemkab Buleleng sedang mempersiapkan tugasnya untuk melakukan pembebasan lahan.

Dinas PUPR Buleleng, telah membentuk tim jasa penilaian pertahanan atau appraisal untuk menilai lahan seluas 11,05 hektare yang akan dibebaskan. Informasinya, jalur yang terkena proyek ada di wilayah Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Sedikitnya 20 KK akan kena dampak. Pun dengan lahan yang kini sedang ditanami tanaman produktif seperti kopi, cengkih, dan tanaman keras lain.

Selain melakukan penilaian terhadap tanah milik warga, tim appraisal katanya juga akan menilai pohon bernilai ekonomis yang tumbuh di lahan warga terdampak. Dengan harapan besaran kerugian yang ditimbulkan bisa ditekan seminimal mungkin.

Untuk pembebasan lahan, Pemkab Buleleng mulanya mempersiapkan anggaran mencapai Rp 10 miliar, yang bersumber dari APBD. Namun saat menggelar rapat bersama dengan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng pada Selasa (14/8) siang, Pemkab Buleleng yang diwakili Sek-



TRIBUN BALI/RATU AYU

DEWA PUSPAKA



TRIBUN BALI/RATU AYU

GEDE SUPRIATNA

da Buleleng Dewa Puspaka mengatakan, pihaknya akan menambah anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 7 miliar. Sehingga totalnya menjadi Rp 17 Miliar.

Penambahan dana ini sebut Puspaka, dilakukan untuk mengantisipasi apabila dana yang sudah disiapkan sebesar Rp 10 miliar kurang. Ini telah dikoordinasikan oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana kepada Gubernur Terpilih Wayan Koster.

Saat disinggung terkait anggaran tambahan sebesar Rp 7 miliar tersebut akan mendapatkan berapa hektare lahan pembebasan, Puspaka menyarankan untuk bertanya kepada Dinas PUPR. "Detailnya nanti PUPR yang menjelaskan. Yang jelas sudah dikaji semua, hasil koordinasi dengan BWS sehingga diperlukan tambahan lagi Rp 7 miliar.

Sementara tim appraisal sebut Puspaka sudah bekerja dan mengecek lapangan. Hasilnya nanti akan disampaikan kepada Pemkab Buleleng dan akan dijadikan referensi. Karena pembangunan shortcut ini adalah kepentingan

umum, Puspaka pun berharap agar masyarakat di Desa Pegayaman yang terkena dampak pembebasan lahan dapat menerimanya dengan ikhlas dan mendukung.

Diharapkan Cukup

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna menilai, penambahan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut sudah diperhitungkan dengan matang oleh Pemkab Buleleng melalui konsultan. Ia pun berharap penambahan Rp 7 miliar tersebut mencukupi.

"Kebutuhan lahan lagi berapa belum disampaikan ke kami. Namun saya yakin itu sudah diperhitungkan oleh konsultan. Tidak mungkin mereka buat anggaran yang tidak benar. Mudah-mudahan mencukupi," jelasnya.

Apakah DPRD mendukung? "Untuk pengadaan tanah kami sampai di Kebijakan Umum Platform Penggunaan Anggaran (KUPPS) 2019 kami sudah kunci. Karena bahwa anggaran pembebasan lahan shortcut itu harus sudah terkunci. Harus ada itu anggarannya," jawabnya singkat. (rtu)